

Efektivitas Kebijakan Sampah Kota Bandung: Peran *Collaborative Governance* dan Pemberdayaan Masyarakat

Ginanjara Wira Saputra^{1*}, Pandji Santosa², Jossy Adiwisatra³

^{1,2}Doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan No. 116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40261, Indonesia

³Doktor Kebijakan Publik, Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia

E-mail: *ginanjara.wira.saputra.s3@unla.ac.id.

Abstract: Waste management in Bandung City faces complex challenges due to the imbalance between waste generation volume and final processing infrastructure capacity. This study aims to analyze the effectiveness of waste management policy implementation from the perspectives of Collaborative Governance and Community Empowerment. Employing a quantitative approach with an explanatory survey design, the study involved 100 respondents comprising government officials (Environment Agency), waste bank managers, environmental cadres, and community members. Data analysis utilized multiple linear regression to examine the influence between variables. The results demonstrate that Collaborative Governance and Community Empowerment simultaneously have a significant impact on policy implementation effectiveness. These findings indicate that a technocratic approach alone is insufficient; institutionalizing cross-actor collaboration and enhancing community capacity as social capital are required. Theoretically, this study strengthens the network governance model in public administration studies while recommending the city government revitalize the role of waste banks as vital instruments for sustainable environmental policy.

Keywords: Policy Effectiveness; Collaborative Governance; Waste Management; Public Participation; Policy Studies.

Abstrak: Pengelolaan sampah di Kota Bandung menghadapi tantangan kompleks akibat ketidakseimbangan antara volume timbulan sampah dengan kapasitas infrastruktur pemrosesan akhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah ditinjau dari aspek Collaborative Governance dan Pemberdayaan Masyarakat. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori, penelitian melibatkan 100 responden yang terdiri dari unsur aparatur pemerintah (DLH), pengelola bank sampah, kader lingkungan, dan masyarakat. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dan Pemberdayaan Masyarakat secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan teknokratis semata tidak cukup; diperlukan pelembagaan kolaborasi lintas aktor dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai modal sosial. Secara teoretis, studi ini memperkuat model tata kelola jejaring (*network governance*) dalam studi administrasi publik, sekaligus merekomendasikan pemerintah kota untuk merevitalisasi peran bank sampah sebagai instrumen vital kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas Kebijakan; Tata Kelola Kolaboratif; Pengelolaan Sampah; Partisipasi Publik; Studi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia telah bergeser dari paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pendekatan pengurangan di sumber berbasis ekonomi sirkular. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan perubahan mendasar ini, namun implementasinya di level pemerintah daerah seringkali terhambat oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur dan rendahnya partisipasi publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Kegagalan pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial dan krisis kesehatan masyarakat (Maharani et al., 2024).

Kota Bandung merepresentasikan kompleksitas masalah tersebut secara nyata. Dengan populasi penduduk yang padat dan laju urbanisasi tinggi, timbulan sampah harian mencapai rata-rata 1.600 ton, sementara kapasitas infrastruktur pemrosesan akhir semakin kritis. Ketergantungan pada TPA Sarimukti yang kerap mengalami gangguan operasional seperti insiden kebakaran dan kelebihan kapasitas (*overload*) menempatkan kota ini dalam status berulang "Darurat Sampah" (DLH Kota Bandung, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan manajemen sampah yang bersifat sentralistik dan teknokratis (sekadar mengandalkan teknologi dan pengangkutan) tidak lagi memadai untuk menangani volume sampah yang terus bereskalasi (Hidayah et al., 2025).

Pemerintah Kota Bandung telah menginisiasi berbagai kebijakan, termasuk program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan (Kang Pisman). Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor (pemerintah, swasta, dan komunitas) masih bersifat fragmentaris dan instruktif, belum menjadi kemitraan yang setara (Setiawandari & Kriswibowo, 2023). Di sisi lain, pelibatan masyarakat seringkali berhenti pada tahap mobilisasi seremonial, belum mencapai taraf pemberdayaan (*empowerment*) yang memandirikan warga dalam mengelola sampah secara mandiri melalui Bank Sampah atau pengolahan skala komunal (Abdussamad et al., 2022).

Penelitian terdahulu mengenai kebijakan sampah cenderung fokus pada aspek teknis infrastruktur (Ulya et al., 2025) atau aspek perilaku individu semata (Pratiwi et al., 2023). Studi lain yang membahas tata kelola (*governance*)

seringkali melihat peran pemerintah sebagai aktor tunggal yang dominan (Destriana et al., 2023). Masih sedikit literatur yang mengintegrasikan perspektif Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) dengan Pemberdayaan Masyarakat secara simultan sebagai determinan efektivitas kebijakan di negara berkembang. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada sintesis kedua variabel tersebut dalam menjelaskan mengapa kebijakan sampah seringkali gagal di tahap implementasi.

Penelitian ini berargumen bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat dicapai hanya dengan menambah armada truk atau membangun insinerator, melainkan membutuhkan pelembagaan kolaborasi (*institutionalized collaboration*) dan penguatan kapasitas masyarakat (R. Rahayu et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh Collaborative Governance dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi model tata kelola lingkungan perkotaan yang adaptif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori (*explanatory survey*). Metode ini dipilih untuk menjelaskan hubungan kausalitas dan menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel *Collaborative Governance* (X1) dan Pemberdayaan Masyarakat (X2) terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan (Y). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat langsung dalam ekosistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Populasi penelitian bersifat heterogen, terdiri dari unsur regulator (pemerintah) dan pelaksana di tingkat akar rumput (komunitas). Untuk memastikan keterwakilan setiap unsur, teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*. Populasi dikelompokkan ke dalam empat strata utama: (1) Aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH), (2) Pengelola Bank Sampah Induk/Unit, (3) Kader Lingkungan/Pendamping Program Kang Pisman, dan (4) Anggota Masyarakat pengguna layanan. Penentuan ukuran sampel ($n=100$) didasarkan pada pedoman ukuran sampel untuk penelitian multivariat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam (Saputra, 2018), yang menyatakan bahwa ukuran sampel sebaiknya lebih besar dari 30 dan kurang dari 500. Selain itu, (Fadhilah et al.,

2023) menyarankan rasio minimum 15 hingga 20 observasi untuk setiap variabel independen. Karena penelitian ini memiliki dua variabel independen dan satu dependen, jumlah 100 responden dianggap representatif dan memadai (*adequate*) untuk meminimalisir *margin of error* serta memenuhi asumsi normalitas data.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 poin (1=Sangat Tidak Setuju hingga 5=Sangat Setuju). Instrumen penelitian telah melalui uji validitas (*Pearson Product Moment*, $r_{hitung} > r_{tabel}$) dan uji reliabilitas (*Cronbach's Alpha* $> 0,70$). Sebelum dilakukan uji hipotesis, data diuji menggunakan Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan residual terdistribusi normal, uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF untuk memastikan tidak ada korelasi kuat antar variabel independen, serta uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser untuk memastikan varians residual homogen. Analisis akhir menggunakan Regresi Linier Berganda (*Multiple Linear Regression*) untuk mengetahui arah dan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen, baik secara parsial (Uji t) maupun simultan (Uji F).

HASIL

Berdasarkan data demografis dari 100 responden, partisipasi didominasi oleh kelompok usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas, yang mengindikasikan potensi literasi lingkungan yang memadai.

Secara deskriptif, variabel *Collaborative Governance* (X1) berada pada kategori Baik dengan skor rata-rata 3,87. Indikator "Dialog Tatap Muka" menjadi aspek dengan skor terendah, menunjukkan masih minimnya forum komunikasi intensif antar aktor. Sementara itu, variabel Pemberdayaan Masyarakat (X2) berada pada kategori cukup baik, dengan skor rata-rata 3,74, di mana aspek kemandirian ekonomi melalui Bank Sampah belum optimal dibandingkan aspek partisipasi pemilahan sampah, yang menunjukkan bahwa keterlibatan warga relatif sudah berjalan, namun penguatan insentif ekonomi dan keberlanjutan usaha berbasis sampah masih perlu ditingkatkan.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data penelitian telah melalui serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Hasil uji normalitas menggunakan

metode Kolmogorov–Smirnov menunjukkan nilai signifikansi $0,200 > 0,05$, yang mengartikan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas memperlihatkan nilai Tolerance seluruh variabel berada di atas 0,10 dan nilai VIF sebesar $1,452 < 10,00$, menegaskan tidak adanya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model. Terakhir, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05, yang mengindikasikan bahwa varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat homogen, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Pengaruh Collaborative Governance dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Ringkasan hasil analisis disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Regresi Linier Berganda				
Variabel	Koefisien Regresi (B)	thitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	1,237	–	–	–
Collaborative Governance (X1)	0,421	6,215	0,000	Signifikan
Pemberdayaan Masyarakat (X2)	0,389	5,842	0,001	Signifikan
R Square (R ²)	0,564			
Fhitung	45,762		0,000	Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data Primer (2025)

Berdasarkan Tabel 1, model persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 1,237 + 0,421X1 + 0,389X2 + e$$

Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan nilai Fhitung sebesar 45,762 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang membuktikan bahwa *Collaborative Governance* dan Pemberdayaan Masyarakat secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Secara parsial (Uji t), variabel *Collaborative Governance* (X1) memiliki pengaruh positif signifikan dengan thitung sebesar 6,215, sedangkan variabel Pemberdayaan Masyarakat (X2) juga berpengaruh positif signifikan dengan thitung sebesar 5,842. Koefisien regresi X1 (0,421) yang sedikit lebih tinggi dibandingkan X2 (0,389) mengindikasikan bahwa aspek kolaborasi regulasi memiliki dampak yang sedikit lebih dominan daripada aspek pemberdayaan dalam konteks studi ini. Adapun kemampuan kedua variabel dalam menjelaskan variasi efektivitas kebijakan ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,564, yang berarti kontribusi pengaruhnya adalah

56,4%, sementara sisanya sebesar 43,6% ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Temuan empiris menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* memiliki pengaruh paling dominan terhadap efektivitas kebijakan ($B=0,421$). Secara statistik, hal ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan penanganan sampah di Kota Bandung sangat bergantung pada kualitas interaksi antar-aktor (pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas). Temuan ini sejalan dengan model (Ansell & Gash, 2008) yang menempatkan "proses kolaboratif" sebagai jantung dari tata kelola publik modern.

Namun, jika dibedah lebih dalam, dominasi variabel ini mengirimkan sinyal krusial: masalah sampah di Bandung bukan lagi masalah teknis operasional semata, melainkan masalah kelembagaan (*institutional problem*). Tingginya signifikansi variabel ini mengindikasikan bahwa responden baik dari unsur DLH maupun masyarakat meyakini bahwa kebijakan seperti Kang Pisman hanya akan efektif jika sekat-sekat birokrasi diruntuhkan.

Kritik mendasar dari temuan ini terletak pada indikator "Dialog Tatap Muka" yang memiliki skor terendah (seperti dipaparkan di bagian Hasil). Hal ini menyiratkan bahwa praktik kolaborasi di Bandung masih terjebak pada pola "instruksi" atau "sosialisasi satu arah", belum mencapai tahap "dialog deliberatif" yang setara. Kebijakan seringkali turun dari atas (*top-down*) tanpa pelibatan aktor non-pemerintah sejak fase desain. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ke depan membutuhkan transformasi model komunikasi (Saputra et al., 2025): dari sekadar mobilisasi aktor menjadi partisipasi substantif di mana Bank Sampah dan komunitas lokal memiliki daya tawar dalam pengambilan keputusan.

Pemberdayaan Masyarakat terbukti berpengaruh positif signifikan ($B=0,389$), meskipun koefisiennya sedikit di bawah kolaborasi. Hal ini menegaskan teori bahwa modal sosial (*social capital*) adalah prasyarat keberhasilan kebijakan lingkungan (S. P. Rahayu et al., 2025). Tanpa pemberdayaan, infrastruktur fisik seperti TPS3R atau mesin insinerator hanya akan menjadi monumen mati.

Dalam konteks Kota Bandung, signifikansi variabel ini menyoroti peran strategis Bank Sampah sebagai ujung tombak pengurangan sampah di sumber.

Namun, fakta bahwa pengaruhnya sedikit lebih rendah dibandingkan aspek tata kelola (*governance*) mengindikasikan sebuah anomali: masyarakat sebenarnya "siap" bergerak, namun sistem pendukungnya (regulasi, insentif pasar, offtaker hasil daur ulang) belum sepenuhnya optimal.

Pemberdayaan yang terjadi saat ini masih cenderung bersifat "mobilisasi programatik" masyarakat memilah sampah karena ada instruksi atau lomba belum sepenuhnya menjadi "kesadaran otonom" yang berbasis nilai ekonomi sirkular. Implikasinya, pemerintah kota tidak bisa lagi hanya mengandalkan himbauan moral. Strategi pemberdayaan harus digeser ke arah insentif ekonomi yang konkret, misalnya dengan mengintegrasikan Bank Sampah ke dalam rantai pasok industri daur ulang formal, sehingga partisipasi masyarakat berkelanjutan bukan karena paksaan, melainkan karena manfaat rasional yang diterima.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur Administrasi Publik dengan memperkuat *Network Governance* dalam konteks negara berkembang. Berbeda dengan studi di negara maju yang infrastrukturnya sudah mapan, studi ini membuktikan bahwa di tengah keterbatasan infrastruktur (seperti kasus TPA Sarimukti), "perangkat lunak" berupa kolaborasi jejaring dan keberdayaan warga justru menjadi variabel penentu (*determinant factor*) yang lebih krusial dibanding "perangkat keras" teknologi semata.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan *re-engineering* kelembagaan melalui pelembagaan forum multi-pihak yang lebih inklusif. Hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk gugus tugas pengelolaan sampah yang tidak hanya didominasi oleh birokrat, melainkan memberikan posisi sejajar bagi perwakilan Bank Sampah Induk dan sektor swasta dalam perencanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pergeseran paradigma insentif dari pola bantuan hibah sarana menjadi skema insentif berbasis kinerja (*output-based*). Skema ini difokuskan pada pemberian penghargaan berdasarkan tonase reduksi sampah bagi RW atau Bank Sampah yang berkinerja tinggi, guna memacu kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung sangat bergantung pada sinergi antara *Collaborative*

Governance dan Pemberdayaan Masyarakat, di mana aspek kolaborasi terbukti menjadi determinan paling dominan. Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan utama kebijakan saat ini bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan lemahnya pelebagaan interaksi antar-aktor yang masih bersifat instruktif dan belum deliberatif, serta partisipasi warga yang masih sebatas mobilisasi programatik tanpa kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Secara teoretis, studi ini memperkuat *Network Governance* dalam konteks negara berkembang, yang membuktikan bahwa di tengah keterbatasan infrastruktur fisik, "infrastruktur lunak" berupa modal sosial dan kualitas jejaring kelembagaan menjadi prasyarat mutlak keberhasilan kebijakan, sekaligus mengoreksi pendekatan teknokratis-sentralistik yang selama ini mendominasi literatur kebijakan persampahan.

Sebagai implikasi praktis, Pemerintah Kota Bandung direkomendasikan untuk merevitalisasi tata kelola melalui pembentukan forum multi-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunan anggaran, serta mentransformasi skema pemberdayaan dari pendekatan sosialisasi ke arah insentif ekonomi dengan mengintegrasikan Bank Sampah ke dalam rantai pasok industri formal. Kendati demikian, mengingat keterbatasan desain *cross-sectional* dan lokus tunggal dalam studi ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan pendekatan *longitudinal* atau *mixed-method* serta memperluas cakupan ke wilayah aglomerasi Bandung Raya, guna menangkap dinamika perubahan perilaku aktor secara lebih mendalam dan mendapatkan generalisasi model kebijakan yang lebih komprehensif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis merekomendasikan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan rekayasa kelembagaan melalui revitalisasi forum kolaborasi dan transformasi skema insentif. Pola komunikasi perlu digeser dari sekadar sosialisasi satu arah menjadi dialog deliberatif dengan melembagakan forum multi-pihak yang memiliki kewenangan substantif dalam perencanaan anggaran (musrenbang tematik). Selain itu, paradigma pemberdayaan harus beralih dari bantuan fisik semata menjadi insentif berbasis kinerja ekonomi, baik melalui fasilitasi kemitraan strategis antara Bank Sampah dengan industri daur

ulang (*off-taker*) maupun penerapan insentif fiskal berupa pengurangan retribusi bagi wilayah yang terbukti mampu mereduksi residu sampah secara signifikan.

Bagi pengembangan keilmuan administrasi publik, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokus penelitian ke kawasan aglomerasi Cekungan Bandung dengan jumlah sampel yang lebih besar guna meningkatkan generalisasi temuan. Riset mendatang juga direkomendasikan menggunakan metode campuran (*mixed methods*) untuk menggali kedalaman konteks interaksi antar-aktor yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh statistik, serta mempertimbangkan penambahan variabel baru seperti *Digital Governance* atau *Political Will* kepemimpinan lokal yang berpotensi menjadi determinan krusial dalam efektivitas kebijakan publik modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Destriana, W. H., Sugandi, Y. S., & Saputra, G. W. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Dan Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*, 6(2), 303–313. <https://doi.org/10.31539/alignment.v6i2.7016>
- DLH Kota Bandung. (2022). *Laporan kinerja pengelolaan sampah Kota Bandung tahun 2022*.
- Fadhilah, M. H., Muchtar, M., & Robinson Sihombing, P. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4782>
- Hidayah, B. N., Suherman, A., & Rantau, M. I. (2025). Inovasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi Silacak (Sistem Informasi Lacak Armada) Dalam Upaya Peningkatan Layanan Pengangkutan Sampah Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangaerang. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v7i1.7012>
- Maharani, W. M., Wiludjeng, F. A., & Santoso, A. A. (2024). Menggagas Collaborative Governance untuk Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik di Desa Bacem, Kabupaten Blitar. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 01–17. <https://doi.org/10.62383/studi.v1i4.44>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69*.
- Pratiwi, S. R. D., Widodo, D., & Radjikan. (2023). Efektivitas Penerapan

- Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Kebun Binatang Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(6), 153–161.
- Rahayu, R., Anwar, F., Kasman, & Darmi, T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(1). <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4963>
- Rahayu, S. P., Saputra, G. W., & Sahadi, S. (2025). Peran Smart Fisheries Village Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Melalui Wisata Edukasi Dan Kuliner : Studi Kasus Kampung Nila Kawali. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(3), 915–924. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i3.5442>
- Saputra, G. W. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Bina Administrasi (JBA)*, VI(01), 16–30. <https://stiabandung.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/Isi-V6-N1-2.pdf>
- Saputra, G. W., Kurniawati, K., & Susilawati, S. (2025). *Manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa: Konsep Dinamika dan Implementasi di Indonesia* (Pertama). CV. Dewa Publishing.
- Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8218>
- Ulya, T. O., Herawati, A. R., & Subowo, A. (2025). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap. *Journal of Management and Public Policy*, 13(3), 1284–1296. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.46180>